



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2016**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1428-Keu/2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Karawang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaranb Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 3.988.794.323.392,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 4.292.365.679.855,00 (-)</u>
Surplus/ (Defisit)	(Rp. 303.571.356.463,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 314.571.356.463,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 11.000.000.000,00 (-)</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 303.571.356.463,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan :	Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp.1.264.521.938.077,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.2.075.172.758.000,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp.649.099.627.315,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 834.510.900.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 126.004.060.600,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.163.449.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 295.843.528.477,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp. 349.508.139.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 1.250.725.634.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 474.938.985.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 3.942.570.000,00
 - b. Dana Bagi Hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 336.182.383.315,00
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 308.974.674.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 2.000.519.407.948,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 2.291.846.271.907,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 1.442.801.087.030,00
 - b. Belanja hibah sejumlah Rp. 32.521.280.000,00
 - c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 28.541.600.000,00
 - d. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa Rp. 66.066.925.000,00
 - e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota / Pemerintah Desa dan Partai Politik sejumlah Rp. 429.088.515.918,00
 - f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 1.500.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 259.599.431.620,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 1.129.433.142.868,00
 - c. Belanja modal sejumlah Rp. 902.813.697.419,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 314.571.356.463,00

- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 314.571.356.463,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 30 Desember 2016



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,



TEDDY RUSFENDI, S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016

NOMOR : 19 .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H. KIKI SAUBARI, SH, MH.

Pembina TK I
NIP. 19590125 198503 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT :
(211.../2016)

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG		
RINGKASAN APBD		
TAHUN ANGGARAN 2017		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	3.988.794.323.392,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.264.521.938.077,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	834.510.900.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	126.004.060.600,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.163.449.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	295.843.528.477,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.075.172.758.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	349.508.139.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.250.725.634.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	474.938.985.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	649.099.627.315,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.942.570.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	336.182.383.315,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	308.974.674.000,00
2	BELANJA	4.292.365.679.855,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.000.519.407.948,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.442.801.087.030,00
2.1.4	Belanja Hibah	32.521.280.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	28.541.600.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	66.066.925.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	429.088.515.918,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.291.846.271.907,00
2.2.1	Belanja Pegawai	259.599.431.620,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.129.433.142.868,00
2.2.3	Belanja Modal	902.813.697.419,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(303.571.356.463,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	314.571.356.463,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	314.571.356.463,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	11.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	303.571.356.463,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00



BUPATI KARAWANG

CELICA MURRACHADIANA

RINGKASAN APBD

Printed By SimDa

Halaman 1



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	871.260.884.237,00	156.203.024.000,00	1.027.463.908.237,00
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	0,00	871.260.884.237,00	151.203.024.000,00	1.022.463.908.237,00
2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	75.007.768.000,00	92.419.180.557,00	378.572.130.928,00	470.991.311.485,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	75.007.768.000,00	92.419.180.557,00	378.572.130.928,00	470.991.311.485,00
1.02.02	RSUD	186.250.000.000,00	31.117.297.917,00	237.277.991.979,00	268.395.289.896,00
1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	186.250.000.000,00	31.117.297.917,00	237.277.991.979,00	268.395.289.896,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.019.600.000,00	17.492.873.150,00	853.668.926.000,00	871.161.799.150,00
1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.019.600.000,00	17.492.873.150,00	853.668.926.000,00	871.161.799.150,00
1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48.000.000,00	9.364.408.185,00	165.318.000.000,00	174.682.408.185,00
1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	30.000.204.162,00	30.000.204.162,00
1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48.000.000,00	9.364.408.185,00	132.317.795.838,00	141.682.204.023,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
1.05.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.618.276.665,00	3.895.000.000,00	6.513.276.665,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	2.618.276.665,00	3.895.000.000,00	6.513.276.665,00
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	0,00	10.370.583.916,00	10.355.000.000,00	20.725.583.916,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	10.370.583.916,00	10.355.000.000,00	20.725.583.916,00
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000,00	5.283.976.111,00	10.260.000.000,00	15.543.976.111,00
1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	4.924.800.000,00	4.924.800.000,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	150.000.000,00	5.283.976.111,00	5.335.200.000,00	10.619.176.111,00
1.06.01	Dinas Sosial	0,00	4.988.507.690,00	10.165.000.000,00	15.153.507.690,00
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	4.988.507.690,00	10.165.000.000,00	15.153.507.690,00
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.200.000.000,00	12.249.780.878,00	18.786.000.000,00	31.035.780.878,00
2.01	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	19.200.000.000,00	12.249.780.878,00	18.134.250.000,00	30.384.030.878,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2		3	4	5	6
2.02.01	3.08	Urusan Pilihan Transmigrasi	0,00	0,00	651.750.000,00	651.750.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	6.407.388.624,00	4.512.500.000,00	10.919.888.624,00
2.03.01	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	6.407.388.624,00	4.512.500.000,00	10.919.888.624,00
		Dinas Pangan	0,00	3.871.653.832,00	6.270.377.000,00	10.142.030.832,00
2.05.01	2.03	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	0,00	3.871.653.832,00	6.270.377.000,00	10.142.030.832,00
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.920.000.000,00	11.320.847.586,00	44.550.000.000,00	55.870.847.586,00
2.06.01	1.03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	622.320.000,00	622.320.000,00
	2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	7.920.000.000,00	11.320.847.586,00	43.927.680.000,00	55.248.527.586,00
2.07.01		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	6.351.671.004,00	12.964.962.000,00	19.316.633.004,00
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	6.351.671.004,00	12.964.962.000,00	19.316.633.004,00
2.08.01		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	5.740.649.660,00	13.300.000.000,00	19.040.649.660,00
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	0,00	0,00	809.000.000,00	809.000.000,00
2.09.01	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	5.740.649.660,00	11.405.675.000,00	17.146.324.660,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	1.085.325.000,00	1.085.325.000,00
2.10.01		Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	14.755.026.106,00	9.013.550.000,00	23.768.576.106,00
	2.08	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	14.755.026.106,00	8.994.425.000,00	23.749.451.106,00
2.11.01	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	19.125.000,00	19.125.000,00
		Dinas Perhubungan	11.311.602.000,00	13.153.262.966,00	9.500.000.000,00	22.653.262.966,00
2.12.01	2.09	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	11.311.602.000,00	13.153.262.966,00	9.500.000.000,00	22.653.262.966,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.070.388.430,00	9.025.000.000,00	13.095.388.430,00
2.13.01	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	4.070.388.430,00	8.337.895.000,00	12.408.283.430,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	0,00	264.895.000,00	264.895.000,00
2.14.01	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	422.210.000,00	422.210.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.045.055.264,00	5.700.000.000,00	10.745.055.264,00
2.15.01	2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.045.055.264,00	5.700.000.000,00	10.745.055.264,00
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.819.306.000,00	10.655.730.145,00	5.225.000.000,00	15.880.730.145,00
2.16.01	2.12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	75.819.306.000,00	10.655.730.145,00	5.225.000.000,00	15.880.730.145,00
		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	5.437.242.967,00	20.154.346.000,00	25.591.588.967,00
2.17.01	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	5.437.242.967,00	18.423.346.000,00	23.860.588.967,00
	3.02	Urusan Pilihan Pariwisata	0,00	0,00	1.485.000.000,00	1.485.000.000,00
2.18.01	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2		3	4	5	6
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		0,00	3.321.259.206,00	3.990.000.000,00	7.311.259.206,00
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		0,00	0,00	791.730.000,00	791.730.000,00
2.17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan		0,00	3.321.259.206,00	2.503.250.000,00	5.824.509.206,00
2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan		0,00	0,00	695.020.000,00	695.020.000,00
3.01.01	Dinas Perikanan		594.000.000,00	8.265.675.972,00	6.920.342.450,00	15.186.018.422,00
3.01	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan		594.000.000,00	8.265.675.972,00	6.920.342.450,00	15.186.018.422,00
3.03.01	Dinas Pertanian		378.600.000,00	31.466.754.635,00	41.538.850.000,00	73.005.604.635,00
2.14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik		0,00	0,00	670.000.000,00	670.000.000,00
3.03	Urusan Pilihan Pertanian		378.600.000,00	31.466.754.635,00	40.868.850.000,00	72.335.604.635,00
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		5.514.120.000,00	10.689.358.403,00	17.200.000.000,00	27.889.358.403,00
3.05	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral		0,00	0,00	6.462.710.000,00	6.462.710.000,00
3.06	Urusan Pilihan Perdagangan		0,00	0,00	3.574.000.000,00	3.574.000.000,00
3.07	Urusan Pilihan Perindustrian		5.514.120.000,00	10.689.358.403,00	7.088.290.000,00	17.777.648.403,00
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan		0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		0,00	20.068.172.100,00	0,00	20.068.172.100,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		0,00	20.068.172.100,00	0,00	20.068.172.100,00
4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		0,00	1.373.568.800,00	0,00	1.373.568.800,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		0,00	1.373.568.800,00	0,00	1.373.568.800,00
4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang		0,00	24.169.218.919,00	77.425.000.000,00	101.594.218.919,00
1.01	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		0,00	0,00	351.150.000,00	351.150.000,00
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		0,00	0,00	5.261.000.000,00	5.261.000.000,00
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial		0,00	0,00	12.394.530.000,00	12.394.530.000,00
2.04	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan		0,00	0,00	1.446.489.000,00	1.446.489.000,00
2.05	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup		0,00	0,00	840.000.000,00	840.000.000,00
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa		0,00	0,00	839.120.000,00	839.120.000,00
2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika		0,00	0,00	843.810.000,00	843.810.000,00
2.11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0,00	0,00	254.620.000,00	254.620.000,00
2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan		0,00	0,00	208.452.000,00	208.452.000,00
3.06	Urusan Pilihan Perdagangan		0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		0,00	24.169.218.919,00	53.013.029.000,00	77.182.247.919,00
4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan		0,00	0,00	1.897.800.000,00	1.897.800.000,00
4.01.04	Sekretariat DPRD		0,00	6.106.762.078,00	43.245.000.000,00	49.351.762.078,00
1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial		0,00	0,00	935.025.000,00	935.025.000,00

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
4.01.05	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	257.725.000,00	257.725.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	6.106.762.078,00	42.052.250.000,00	48.159.012.078,00
		Kecamatan Karawang Barat	0,00	10.092.717.206,00	6.321.000.000,00	16.413.717.206,00
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	0,00	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	722.530.000,00	722.530.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	3.731.340.000,00	3.731.340.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	40.750.000,00	40.750.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	10.092.717.206,00	1.598.580.000,00	11.691.297.206,00
		Kecamatan Pangkalan	0,00	2.223.552.590,00	553.500.000,00	2.777.052.590,00
4.01.06	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	195.750.000,00	195.750.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.223.552.590,00	303.000.000,00	2.526.552.590,00
		Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	2.513.485.685,00	568.250.000,00	3.081.735.685,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	203.450.000,00	203.450.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.01.07	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.513.485.685,00	333.390.000,00	2.846.875.685,00
		Kecamatan Ciampel	0,00	2.122.162.505,00	563.900.000,00	2.686.062.505,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	221.950.000,00	221.950.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.122.162.505,00	287.000.000,00	2.409.162.505,00
		Kecamatan Klari	0,00	3.011.859.748,00	680.724.000,00	3.692.583.748,00
4.01.08	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	293.485.000,00	293.485.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	24.395.000,00	24.395.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	3.011.859.748,00	319.844.000,00	3.331.703.748,00
		Kecamatan Klari	0,00	3.011.859.748,00	680.724.000,00	3.692.583.748,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	293.485.000,00	293.485.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	24.395.000,00	24.395.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
4.01.09	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	3.011.859.748,00	319.844.000,00	3.331.703.748,00
		Kecamatan Klari	0,00	3.011.859.748,00	680.724.000,00	3.692.583.748,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	293.485.000,00	293.485.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	24.395.000,00	24.395.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	3.011.859.748,00	319.844.000,00	3.331.703.748,00
		Kecamatan Klari	0,00	3.011.859.748,00	680.724.000,00	3.692.583.748,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	293.485.000,00	293.485.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
4.01.10		Kecamatan Rengasdengklok	0,00	2.881.420.979,00	565.975.000,00	3.447.395.979,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	242.180.000,00	242.180.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	3.163.000,00	3.163.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	8.163.000,00	8.163.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.881.420.979,00	295.469.000,00	3.176.889.979,00
4.01.11		Kecamatan Kutawaluya	0,00	2.306.856.426,00	606.000.000,00	2.912.856.426,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	276.697.500,00	276.697.500,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	18.345.000,00	18.345.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.306.856.426,00	293.457.450,00	2.600.313.876,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	5.000.050,00	5.000.050,00
4.01.12		Kecamatan Batujaya	0,00	2.382.821.826,00	547.000.000,00	2.929.821.826,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	201.200.000,00	201.200.000,00
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	22.855.000,00	22.855.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.382.821.826,00	282.945.000,00	2.665.766.826,00
4.01.13		Kecamatan Tirtajaya	0,00	2.224.485.976,00	580.700.000,00	2.805.185.976,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	235.637.500,00	235.637.500,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	6.425.000,00	6.425.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	10.687.500,00	10.687.500,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.224.485.976,00	320.200.000,00	2.544.685.976,00
4.01.14		Kecamatan Pedes	0,00	2.256.136.289,00	606.970.000,00	2.863.106.289,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	251.690.000,00	251.690.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.256.136.289,00	316.480.000,00	2.572.616.289,00
4.01.15		Kecamatan Cibuya	0,00	2.526.705.671,00	580.700.000,00	3.107.405.671,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6	6
4.01.16	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	271.819.000,00	271.819.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	7.446.400,00	7.446.400,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	8.661.000,00	8.661.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.526.705.671,00	282.773.600,00	2.809.479.271,00
	Kecamatan Pakisjaya		0,00	2.394.927.453,00	549.600.000,00	2.944.527.453,00
4.01.17	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	208.350.000,00	208.350.000,00
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	23.195.000,00	23.195.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	36.800.000,00	36.800.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.394.927.453,00	267.255.000,00	2.662.182.453,00
4.01.18	Kecamatan Cikampek		0,00	2.918.317.062,00	575.054.000,00	3.493.371.062,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	255.700.000,00	255.700.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	5.955.000,00	5.955.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.918.317.062,00	299.749.000,00	3.218.066.062,00
4.01.19	Kecamatan Jatisari		0,00	3.083.664.464,00	629.000.000,00	3.712.664.464,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	309.200.000,00	309.200.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	3.083.664.464,00	290.900.000,00	3.374.564.464,00
4.01.20	Kecamatan Cilamaya Wetan		0,00	2.552.229.680,00	664.940.000,00	3.217.169.680,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	314.240.000,00	314.240.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	21.750.000,00	21.750.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.552.229.680,00	308.950.000,00	2.861.179.680,00
	Kecamatan Tirtamulya		0,00	2.235.392.531,00	591.595.000,00	2.826.987.531,00
4.01.20	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	266.825.000,00	266.825.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	33.400.000,00	33.400.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.235.392.531,00	257.440.000,00	2.492.832.531,00

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6	
4.01.21	Kecamatan Telagasari	0,00	2.590.888.002,00	571.000.000,00	3.161.888.002,00	
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	281.845.000,00	281.845.000,00	
2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00	
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	7.225.000,00	7.225.000,00	
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.590.888.002,00	265.280.000,00	2.856.168.002,00	
4.01.22	Kecamatan Rawamerta	0,00	2.246.996.895,00	653.000.000,00	2.899.996.895,00	
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	261.600.000,00	261.600.000,00	
2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.246.996.895,00	353.400.000,00	2.600.396.895,00	
4.01.23	Kecamatan Lemahabang	0,00	2.365.643.984,00	585.000.000,00	2.950.643.984,00	
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	248.400.000,00	248.400.000,00	
2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.365.643.984,00	303.100.000,00	2.668.743.984,00	
4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00	
4.01.24	Kecamatan Tempuran	0,00	2.848.760.074,00	637.300.000,00	3.486.060.074,00	
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	318.912.000,00	318.912.000,00	
2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	15.110.000,00	15.110.000,00	
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	6.411.500,00	6.411.500,00	
2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	7.225.000,00	7.225.000,00	
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.848.760.074,00	289.641.500,00	3.138.401.574,00	
4.01.25	Kecamatan Majalaya	0,00	2.487.737.183,00	531.300.000,00	3.019.037.183,00	
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	181.405.000,00	181.405.000,00	
2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	28.710.000,00	28.710.000,00	
2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	21.760.000,00	21.760.000,00	
4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.487.737.183,00	285.525.000,00	2.773.262.183,00	
4.01.26	Kecamatan Jayakarta	0,00	2.264.107.614,00	545.700.000,00	2.809.807.614,00	
1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	200.950.000,00	200.950.000,00	
2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00	

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6	
4.01.27	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.264.107.614,00	293.950.000,00	2.558.057.614,00
	Kecamatan Cilamaya Kulon		0,00	2.236.716.976,00	683.300.000,00	2.920.016.976,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	313.658.000,00	313.658.000,00
	1.06	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	18.490.000,00	18.490.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	2.13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	12.820.000,00	12.820.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.236.716.976,00	299.682.000,00	2.536.398.976,00
4.01.28	Kecamatan Banyusari		0,00	2.287.957.100,00	635.100.000,00	2.923.057.100,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	287.150.000,00	287.150.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.287.957.100,00	295.200.000,00	2.583.157.100,00
	Kecamatan Kota Baru		0,00	2.293.152.617,00	583.800.000,00	2.876.952.617,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	247.254.800,00	247.254.800,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
4.01.29	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.293.152.617,00	284.545.200,00	2.577.697.817,00
	Kecamatan Karawang Timur		0,00	6.150.119.790,00	3.613.000.000,00	9.763.119.790,00
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00
	1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	429.500.000,00	429.500.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	34.250.000,00	34.250.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	1.985.496.000,00	1.985.496.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	6.150.119.790,00	1.075.254.000,00	7.225.373.790,00
4.01.30	Kecamatan Karawang Timur		0,00	6.150.119.790,00	3.613.000.000,00	9.763.119.790,00
	1.02	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00
	1.04	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	429.500.000,00	429.500.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	34.250.000,00	34.250.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	1.985.496.000,00	1.985.496.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	6.150.119.790,00	1.075.254.000,00	7.225.373.790,00
	Kecamatan Telukjambe Barat		0,00	2.438.067.215,00	591.840.000,00	3.029.907.215,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00
4.01.31	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
			0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
				TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1		2	3	4	5	6
4.01.32	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.438.067.215,00	339.340.000,00	2.777.407.215,00
		Kecamatan Tegalwaru	0,00	2.294.292.384,00	572.300.000,00	2.866.592.384,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	230.585.000,00	230.585.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	10.225.000,00	10.225.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
4.01.33	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.294.292.384,00	310.240.000,00	2.604.532.384,00
		Kecamatan Purwasari	0,00	1.990.402.791,00	525.000.000,00	2.515.402.791,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	190.010.600,00	190.010.600,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	14.561.500,00	14.561.500,00
	2.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	9.813.000,00	9.813.000,00
4.01.34	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	1.990.402.791,00	295.123.400,00	2.285.526.191,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	0,00	2.341.500,00	2.341.500,00
		Kecamatan Cilebar	0,00	2.066.385.979,00	600.040.000,00	2.666.425.979,00
	1.05	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	0,00	0,00	239.200.000,00	239.200.000,00
	2.02	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00
4.02.01	2.07	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00
	2.16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	2.066.385.979,00	319.790.000,00	2.386.175.979,00
		Inspektorat	0,00	9.751.629.385,00	7.695.000.000,00	17.446.629.385,00
	2.18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	0,00	0,00	30.250.000,00	30.250.000,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	0,00	9.751.629.385,00	0,00	9.751.629.385,00
4.03.01	4.02	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	0,00	0,00	7.664.750.000,00	7.664.750.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	7.108.062.996,00	9.500.000.000,00	16.608.062.996,00
	4.03	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	0,00	7.108.062.996,00	9.377.190.000,00	16.485.252.996,00
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	122.810.000,00	122.810.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.770.070.427.392,00	591.596.620.307,00	13.537.500.000,00	605.134.120.307,00
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	2.770.070.427.392,00	591.596.620.307,00	175.410.000,00	591.772.030.307,00
4.04.01	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	0,00	0,00	13.362.090.000,00	13.362.090.000,00
		Badan Pendapatan Daerah	834.510.900.000,00	49.543.645.566,00	49.420.183.550,00	98.963.829.116,00
	2.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
	4.04	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	834.510.900.000,00	49.543.645.566,00	49.170.183.550,00	98.713.829.116,00

KODE		SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
1	2		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
3	4	5	6			
4.04.01		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				
	4.01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	314.571.356.463,00	11.000.000.000,00	303.571.356.463,00	
			314.571.356.463,00	11.000.000.000,00	303.571.356.463,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN						0,00



BUPATI KARAWANG

CELICA NURRACHADIANA



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
 TAHUN ANGGARAN 2017

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	263.475.368.000,00	1.044.915.988.428,00	1.847.232.447.307,00	2.892.148.435.735,00
1.01	Pendidikan	0,00	871.260.884.237,00	152.345.904.000,00	1.023.606.788.237,00
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	871.260.884.237,00	151.203.024.000,00	1.022.463.908.237,00
1.01 . 1.01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	871.260.884.237,00	151.203.024.000,00	1.022.463.908.237,00
1.01 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	791.730.000,00	791.730.000,00
1.01 . 2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	791.730.000,00	791.730.000,00
1.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	351.150.000,00	351.150.000,00
1.01 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	351.150.000,00	351.150.000,00
1.02	Kesehatan	261.257.768.000,00	123.536.478.474,00	616.836.222.907,00	740.372.701.381,00
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	75.007.768.000,00	92.419.180.557,00	378.572.130.928,00	470.991.311.485,00
1.02 . 1.02.01.01	Dinas Kesehatan	75.007.768.000,00	92.419.180.557,00	378.572.130.928,00	470.991.311.485,00
1.02 . 1.02.02	RSUD	186.250.000.000,00	31.117.297.917,00	237.277.991.979,00	268.395.289.896,00
1.02 . 1.02.02.01	Rumah Sakit Umum Daerah	186.250.000.000,00	31.117.297.917,00	237.277.991.979,00	268.395.289.896,00
1.02 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	809.000.000,00	809.000.000,00
1.02 . 2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	809.000.000,00	809.000.000,00
1.02 . 4.01.05	Kecamatan Karawang Barat	0,00	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00
1.02 . 4.01.05.01	Kecamatan Karawang Barat	0,00	0,00	138.600.000,00	138.600.000,00
1.02 . 4.01.30	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00
1.02 . 4.01.30.01	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.019.600.000,00	17.492.873.150,00	884.291.450.162,00	901.784.323.312,00
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.019.600.000,00	17.492.873.150,00	853.668.926.000,00	871.161.799.150,00
1.03 . 1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.019.600.000,00	17.492.873.150,00	853.668.926.000,00	871.161.799.150,00
1.03 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	30.000.204.162,00	30.000.204.162,00
1.03 . 1.04.01.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	30.000.204.162,00	30.000.204.162,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
1.03 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				
1.03 . 2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	0,00	0,00	622.320.000,00	622.320.000,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.04 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1.04 . 1.04.01.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	48.000.000,00	9.364.408.185,00	137.262.595.838,00	146.627.004.023,00
1.04 . 1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.04 . 1.05.03.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	48.000.000,00	9.364.408.185,00	132.317.795.838,00	141.682.204.023,00
1.04 . 4.01.30	Kecamatan Karawang Timur				
1.04 . 4.01.30.01	Kecamatan Karawang Timur	48.000.000,00	9.364.408.185,00	132.317.795.838,00	141.682.204.023,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				
1.05 . 1.05.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.05 . 1.05.01.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	4.924.800.000,00	4.924.800.000,00
1.05 . 1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas				
1.05 . 1.05.02.01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	0,00	0,00	4.924.800.000,00	4.924.800.000,00
1.05 . 1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.05 . 1.05.03.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang				
1.05 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
1.05 . 4.01.05	Kecamatan Karawang Barat				
1.05 . 4.01.05.01	Kecamatan Karawang Barat	150.000.000,00	18.272.836.692,00	32.962.374.400,00	51.235.211.092,00
1.05 . 4.01.06	Kecamatan Pangkalan				
1.05 . 4.01.06.01	Kecamatan Pangkalan	0,00	2.618.276.665,00	3.895.000.000,00	6.513.276.665,00
1.05 . 4.01.07	Kecamatan Telukjambe Timur				
1.05 . 4.01.07.01	Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	2.618.276.665,00	3.895.000.000,00	6.513.276.665,00
1.05 . 4.01.08	Kecamatan Ciampel				
1.05 . 4.01.08.01	Kecamatan Ciampel	0,00	10.370.583.916,00	10.355.000.000,00	20.725.583.916,00
1.05 . 4.01.09	Kecamatan Klari				
1.05 . 4.01.09.01	Kecamatan Klari	0,00	10.370.583.916,00	10.355.000.000,00	20.725.583.916,00
1.05 . 4.01.10	Kecamatan Rengasdengklok				
1.05 . 4.01.10.01	Kecamatan Rengasdengklok	150.000.000,00	5.283.976.111,00	5.335.200.000,00	10.619.176.111,00
1.05 . 4.01.11	Kecamatan Kutawaluya				
		150.000.000,00	5.283.976.111,00	5.335.200.000,00	10.619.176.111,00
		0,00	0,00	5.261.000.000,00	5.261.000.000,00
		0,00	0,00	5.261.000.000,00	5.261.000.000,00
		0,00	0,00	722.530.000,00	722.530.000,00
		0,00	0,00	722.530.000,00	722.530.000,00
		0,00	0,00	195.750.000,00	195.750.000,00
		0,00	0,00	195.750.000,00	195.750.000,00
		0,00	0,00	203.450.000,00	203.450.000,00
		0,00	0,00	203.450.000,00	203.450.000,00
		0,00	0,00	221.950.000,00	221.950.000,00
		0,00	0,00	221.950.000,00	221.950.000,00
		0,00	0,00	293.485.000,00	293.485.000,00
		0,00	0,00	293.485.000,00	293.485.000,00
		0,00	0,00	242.180.000,00	242.180.000,00
		0,00	0,00	242.180.000,00	242.180.000,00
		0,00	0,00	276.697.500,00	276.697.500,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
1.05 . 4.01.11.01	Kecamatan Kutawaluya	0,00	0,00	276.697.500,00	276.697.500,00
1.05 . 4.01.12	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	201.200.000,00	201.200.000,00
1.05 . 4.01.12.01	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	201.200.000,00	201.200.000,00
1.05 . 4.01.13	Kecamatan Tirtajaya	0,00	0,00	235.637.500,00	235.637.500,00
1.05 . 4.01.13.01	Kecamatan Tirtajaya	0,00	0,00	235.637.500,00	235.637.500,00
1.05 . 4.01.14	Kecamatan Pedes	0,00	0,00	251.690.000,00	251.690.000,00
1.05 . 4.01.14.01	Kecamatan Pedes	0,00	0,00	251.690.000,00	251.690.000,00
1.05 . 4.01.15	Kecamatan Cibuaya	0,00	0,00	271.819.000,00	271.819.000,00
1.05 . 4.01.15.01	Kecamatan Cibuaya	0,00	0,00	271.819.000,00	271.819.000,00
1.05 . 4.01.16	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	208.350.000,00	208.350.000,00
1.05 . 4.01.16.01	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	208.350.000,00	208.350.000,00
1.05 . 4.01.17	Kecamatan Cikampek	0,00	0,00	255.700.000,00	255.700.000,00
1.05 . 4.01.17.01	Kecamatan Cikampek	0,00	0,00	255.700.000,00	255.700.000,00
1.05 . 4.01.18	Kecamatan Jatisari	0,00	0,00	309.200.000,00	309.200.000,00
1.05 . 4.01.18.01	Kecamatan Jatisari	0,00	0,00	309.200.000,00	309.200.000,00
1.05 . 4.01.19	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,00	0,00	314.240.000,00	314.240.000,00
1.05 . 4.01.19.01	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,00	0,00	314.240.000,00	314.240.000,00
1.05 . 4.01.20	Kecamatan Tirtamulya	0,00	0,00	266.825.000,00	266.825.000,00
1.05 . 4.01.20.01	Kecamatan Tirtamulya	0,00	0,00	266.825.000,00	266.825.000,00
1.05 . 4.01.21	Kecamatan Telagasari	0,00	0,00	281.845.000,00	281.845.000,00
1.05 . 4.01.21.01	Kecamatan Telagasari	0,00	0,00	281.845.000,00	281.845.000,00
1.05 . 4.01.22	Kecamatan Rawamerta	0,00	0,00	261.600.000,00	261.600.000,00
1.05 . 4.01.22.01	Kecamatan Rawamerta	0,00	0,00	261.600.000,00	261.600.000,00
1.05 . 4.01.23	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	248.400.000,00	248.400.000,00
1.05 . 4.01.23.01	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	248.400.000,00	248.400.000,00
1.05 . 4.01.24	Kecamatan Tempuran	0,00	0,00	318.912.000,00	318.912.000,00
1.05 . 4.01.24.01	Kecamatan Tempuran	0,00	0,00	318.912.000,00	318.912.000,00
1.05 . 4.01.25	Kecamatan Majalaya	0,00	0,00	181.405.000,00	181.405.000,00
1.05 . 4.01.25.01	Kecamatan Majalaya	0,00	0,00	181.405.000,00	181.405.000,00
1.05 . 4.01.26	Kecamatan Jayakarta	0,00	0,00	200.950.000,00	200.950.000,00
1.05 . 4.01.26.01	Kecamatan Jayakarta	0,00	0,00	200.950.000,00	200.950.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
1.05 . 4.01.27	Kecamatan Cilamaya Kulon				
1.05 . 4.01.27.01	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	313.658.000,00	313.658.000,00
1.05 . 4.01.28	Kecamatan Banyusari	0,00	0,00	313.658.000,00	313.658.000,00
1.05 . 4.01.28.01	Kecamatan Banyusari	0,00	0,00	287.150.000,00	287.150.000,00
1.05 . 4.01.29	Kecamatan Kota Baru	0,00	0,00	287.150.000,00	287.150.000,00
1.05 . 4.01.29.01	Kecamatan Kota Baru	0,00	0,00	247.254.800,00	247.254.800,00
1.05 . 4.01.30	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	247.254.800,00	247.254.800,00
1.05 . 4.01.30.01	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	429.500.000,00	429.500.000,00
1.05 . 4.01.31	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	0,00	429.500.000,00	429.500.000,00
1.05 . 4.01.31.01	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00
1.05 . 4.01.32	Kecamatan Tegalwaru	0,00	0,00	215.000.000,00	215.000.000,00
1.05 . 4.01.32.01	Kecamatan Tegalwaru	0,00	0,00	230.585.000,00	230.585.000,00
1.05 . 4.01.33	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	230.585.000,00	230.585.000,00
1.05 . 4.01.33.01	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	190.010.600,00	190.010.600,00
1.05 . 4.01.34	Kecamatan Cilebar	0,00	0,00	190.010.600,00	190.010.600,00
1.05 . 4.01.34.01	Kecamatan Cilebar	0,00	0,00	239.200.000,00	239.200.000,00
1.06	Sosial	0,00	4.988.507.690,00	23.533.900.000,00	28.522.407.690,00
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	0,00	4.988.507.690,00	10.165.000.000,00	15.153.507.690,00
1.06 . 1.06.01.01	Dinas Sosial	0,00	4.988.507.690,00	10.165.000.000,00	15.153.507.690,00
1.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	12.394.530.000,00	12.394.530.000,00
1.06 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	12.394.530.000,00	12.394.530.000,00
1.06 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	935.025.000,00	935.025.000,00
1.06 . 4.01.04.01	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	935.025.000,00	935.025.000,00
1.06 . 4.01.12	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06 . 4.01.12.01	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
1.06 . 4.01.16	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	23.195.000,00	23.195.000,00
1.06 . 4.01.16.01	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	23.195.000,00	23.195.000,00
1.06 . 4.01.27	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
1.06 . 4.01.27.01	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	114.250.908.000,00	102.379.956.668,00	174.309.068.900,00	276.689.025.568,00
2.01	Tenaga Kerja	19.200.000.000,00	12.249.780.878,00	18.134.250.000,00	30.384.030.878,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
2.01 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
2.01 . 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.200.000.000,00	12.249.780.878,00	18.134.250.000,00	30.384.030.878,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.200.000.000,00	12.249.780.878,00	18.134.250.000,00	30.384.030.878,00
2.02 . 2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	6.407.388.624,00	4.930.327.900,00	11.337.716.524,00
2.02 . 2.02.01.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	6.407.388.624,00	4.512.500.000,00	10.919.888.624,00
2.02 . 4.01.05	Kecamatan Karawang Barat	0,00	6.407.388.624,00	4.512.500.000,00	10.919.888.624,00
2.02 . 4.01.05.01	Kecamatan Karawang Barat	0,00	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00
2.02 . 4.01.06	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	89.200.000,00	89.200.000,00
2.02 . 4.01.06.01	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.07	Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.07.01	Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.08	Kecamatan Ciampel	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.08.01	Kecamatan Ciampel	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.09	Kecamatan Klari	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.09.01	Kecamatan Klari	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.02 . 4.01.10	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2.02 . 4.01.10.01	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.11	Kecamatan Kutawaluya	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.11.01	Kecamatan Kutawaluya	0,00	0,00	18.345.000,00	18.345.000,00
2.02 . 4.01.12	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	18.345.000,00	18.345.000,00
2.02 . 4.01.12.01	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.13	Kecamatan Tirtajaya	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.13.01	Kecamatan Tirtajaya	0,00	0,00	6.425.000,00	6.425.000,00
2.02 . 4.01.14	Kecamatan Pedes	0,00	0,00	6.425.000,00	6.425.000,00
2.02 . 4.01.14.01	Kecamatan Pedes	0,00	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00
2.02 . 4.01.15	Kecamatan Cibuya	0,00	0,00	11.350.000,00	11.350.000,00
2.02 . 4.01.15.01	Kecamatan Cibuya	0,00	0,00	7.446.400,00	7.446.400,00
2.02 . 4.01.16	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	7.446.400,00	7.446.400,00
2.02 . 4.01.16.01	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.02 . 4.01.17	Kecamatan Cikampek	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.02 . 4.01.17.01	Kecamatan Cikampek	0,00	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00
		0,00	0,00	8.050.000,00	8.050.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
2.02 . 4.01.18	Kecamatan Jatisari	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
2.02 . 4.01.18.01	Kecamatan Jatisari	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
2.02 . 4.01.20	Kecamatan Tirtamulya	0,00	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00
2.02 . 4.01.20.01	Kecamatan Tirtamulya	0,00	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00
2.02 . 4.01.21	Kecamatan Telagasari	0,00	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00
2.02 . 4.01.21.01	Kecamatan Telagasari	0,00	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00
2.02 . 4.01.22	Kecamatan Rawamerta	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.22.01	Kecamatan Rawamerta	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.23	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.23.01	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.02 . 4.01.24	Kecamatan Tempuran	0,00	0,00	15.110.000,00	15.110.000,00
2.02 . 4.01.24.01	Kecamatan Tempuran	0,00	0,00	15.110.000,00	15.110.000,00
2.02 . 4.01.25	Kecamatan Majalaya	0,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00
2.02 . 4.01.25.01	Kecamatan Majalaya	0,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00
2.02 . 4.01.26	Kecamatan Jayakarta	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.02 . 4.01.26.01	Kecamatan Jayakarta	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2.02 . 4.01.27	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	18.490.000,00	18.490.000,00
2.02 . 4.01.27.01	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	18.490.000,00	18.490.000,00
2.02 . 4.01.28	Kecamatan Banyusari	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.02 . 4.01.28.01	Kecamatan Banyusari	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.02 . 4.01.29	Kecamatan Kota Baru	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.02 . 4.01.29.01	Kecamatan Kota Baru	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.02 . 4.01.30	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	34.250.000,00	34.250.000,00
2.02 . 4.01.30.01	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	34.250.000,00	34.250.000,00
2.02 . 4.01.31	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.02 . 4.01.31.01	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.02 . 4.01.32	Kecamatan Tegalwaru	0,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00
2.02 . 4.01.32.01	Kecamatan Tegalwaru	0,00	0,00	11.850.000,00	11.850.000,00
2.02 . 4.01.33	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	14.561.500,00	14.561.500,00
2.02 . 4.01.33.01	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	14.561.500,00	14.561.500,00
2.02 . 4.01.34	Kecamatan Cilebar	0,00	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
2.02 . 4.01.34.01	Kecamatan Cilebar	0,00	0,00	6.850.000,00	6.850.000,00
2.03	Pangan	0,00	3.871.653.832,00	6.270.377.000,00	10.142.030.832,00
2.03 . 2.03.01	Dinas Pangan	0,00	3.871.653.832,00	6.270.377.000,00	10.142.030.832,00
2.03 . 2.03.01.01	Dinas Pangan	0,00	3.871.653.832,00	6.270.377.000,00	10.142.030.832,00
2.04	Pertanahan	0,00	0,00	1.446.489.000,00	1.446.489.000,00
2.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	1.446.489.000,00	1.446.489.000,00
2.04 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	1.446.489.000,00	1.446.489.000,00
2.05	Lingkungan Hidup	7.920.000.000,00	11.320.847.586,00	44.767.680.000,00	56.088.527.586,00
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.920.000.000,00	11.320.847.586,00	43.927.680.000,00	55.248.527.586,00
2.05 . 2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	7.920.000.000,00	11.320.847.586,00	43.927.680.000,00	55.248.527.586,00
2.05 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	840.000.000,00	840.000.000,00
2.05 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	840.000.000,00	840.000.000,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	0,00	6.351.671.004,00	12.985.375.000,00	19.337.046.004,00
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	6.351.671.004,00	12.964.962.000,00	19.316.633.004,00
2.06 . 2.06.01.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	6.351.671.004,00	12.964.962.000,00	19.316.633.004,00
2.06 . 4.01.06	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00
2.06 . 4.01.06.01	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00
2.06 . 4.01.10	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	0,00	3.163.000,00	3.163.000,00
2.06 . 4.01.10.01	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	0,00	3.163.000,00	3.163.000,00
2.06 . 4.01.12	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.06 . 4.01.12.01	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.06 . 4.01.16	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.06 . 4.01.16.01	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.06 . 4.01.33	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.06 . 4.01.33.01	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	5.740.649.660,00	18.339.409.500,00	24.080.059.160,00
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	5.740.649.660,00	11.405.675.000,00	17.146.324.660,00
2.07 . 2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	5.740.649.660,00	11.405.675.000,00	17.146.324.660,00
2.07 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	839.120.000,00	839.120.000,00
2.07 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	839.120.000,00	839.120.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.07 . 4.01.05	Kecamatan Karawang Barat	0,00	0,00	3.731.340.000,00	3.731.340.000,00
2.07 . 4.01.05.01	Kecamatan Karawang Barat	0,00	0,00	3.731.340.000,00	3.731.340.000,00
2.07 . 4.01.06	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.07 . 4.01.06.01	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.07 . 4.01.07	Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00
2.07 . 4.01.07.01	Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	0,00	6.410.000,00	6.410.000,00
2.07 . 4.01.08	Kecamatan Ciampel	0,00	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00
2.07 . 4.01.08.01	Kecamatan Ciampel	0,00	0,00	14.950.000,00	14.950.000,00
2.07 . 4.01.09	Kecamatan Klari	0,00	0,00	24.395.000,00	24.395.000,00
2.07 . 4.01.09.01	Kecamatan Klari	0,00	0,00	24.395.000,00	24.395.000,00
2.07 . 4.01.10	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	0,00	8.163.000,00	8.163.000,00
2.07 . 4.01.10.01	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	0,00	8.163.000,00	8.163.000,00
2.07 . 4.01.11	Kecamatan Kutawaluya	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.07 . 4.01.11.01	Kecamatan Kutawaluya	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.07 . 4.01.12	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	22.855.000,00	22.855.000,00
2.07 . 4.01.12.01	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	22.855.000,00	22.855.000,00
2.07 . 4.01.13	Kecamatan Tirtajaya	0,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00
2.07 . 4.01.13.01	Kecamatan Tirtajaya	0,00	0,00	7.750.000,00	7.750.000,00
2.07 . 4.01.14	Kecamatan Pedes	0,00	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00
2.07 . 4.01.14.01	Kecamatan Pedes	0,00	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00
2.07 . 4.01.15	Kecamatan Cibuaya	0,00	0,00	8.661.000,00	8.661.000,00
2.07 . 4.01.15.01	Kecamatan Cibuaya	0,00	0,00	8.661.000,00	8.661.000,00
2.07 . 4.01.16	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	36.800.000,00	36.800.000,00
2.07 . 4.01.16.01	Kecamatan Pakisjaya	0,00	0,00	36.800.000,00	36.800.000,00
2.07 . 4.01.17	Kecamatan Cikampek	0,00	0,00	5.955.000,00	5.955.000,00
2.07 . 4.01.17.01	Kecamatan Cikampek	0,00	0,00	5.955.000,00	5.955.000,00
2.07 . 4.01.18	Kecamatan Jatisari	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07 . 4.01.18.01	Kecamatan Jatisari	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07 . 4.01.19	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,00	0,00	21.750.000,00	21.750.000,00
2.07 . 4.01.19.01	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,00	0,00	21.750.000,00	21.750.000,00
2.07 . 4.01.20	Kecamatan Tirtamulya	0,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
2.07 . 4.01.20.01	Kecamatan Tirtamulya	0,00	0,00	26.480.000,00	26.480.000,00
2.07 . 4.01.21	Kecamatan Telagasari	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.07 . 4.01.21.01	Kecamatan Telagasari	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2.07 . 4.01.22	Kecamatan Rawamerta	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07 . 4.01.22.01	Kecamatan Rawamerta	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2.07 . 4.01.23	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.07 . 4.01.23.01	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.07 . 4.01.24	Kecamatan Tempuran	0,00	0,00	6.411.500,00	6.411.500,00
2.07 . 4.01.24.01	Kecamatan Tempuran	0,00	0,00	6.411.500,00	6.411.500,00
2.07 . 4.01.25	Kecamatan Majalaya	0,00	0,00	28.710.000,00	28.710.000,00
2.07 . 4.01.25.01	Kecamatan Majalaya	0,00	0,00	28.710.000,00	28.710.000,00
2.07 . 4.01.26	Kecamatan Jayakarta	0,00	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00
2.07 . 4.01.26.01	Kecamatan Jayakarta	0,00	0,00	31.800.000,00	31.800.000,00
2.07 . 4.01.27	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.07 . 4.01.27.01	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
2.07 . 4.01.28	Kecamatan Banyusari	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.07 . 4.01.28.01	Kecamatan Banyusari	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.07 . 4.01.29	Kecamatan Kota Baru	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07 . 4.01.29.01	Kecamatan Kota Baru	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.07 . 4.01.30	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	1.985.496.000,00	1.985.496.000,00
2.07 . 4.01.30.01	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	1.985.496.000,00	1.985.496.000,00
2.07 . 4.01.31	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.07 . 4.01.31.01	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
2.07 . 4.01.32	Kecamatan Tegalwaru	0,00	0,00	10.225.000,00	10.225.000,00
2.07 . 4.01.32.01	Kecamatan Tegalwaru	0,00	0,00	10.225.000,00	10.225.000,00
2.07 . 4.01.33	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	9.813.000,00	9.813.000,00
2.07 . 4.01.33.01	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	9.813.000,00	9.813.000,00
2.07 . 4.01.34	Kecamatan Cilebar	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00
2.07 . 4.01.34.01	Kecamatan Cilebar	0,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	14.755.026.106,00	8.994.425.000,00	23.749.451.106,00
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	14.755.026.106,00	8.994.425.000,00	23.749.451.106,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
2.08 . 2.08.01.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	14.755.026.106,00	8.994.425.000,00	23.749.451.106,00
2.09	Perhubungan				
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	11.311.602.000,00	13.153.262.966,00	9.500.000.000,00	22.653.262.966,00
2.09 . 2.09.01.01	Dinas Perhubungan	11.311.602.000,00	13.153.262.966,00	9.500.000.000,00	22.653.262.966,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	11.311.602.000,00	13.153.262.966,00	9.500.000.000,00	22.653.262.966,00
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.070.388.430,00	9.689.430.000,00	13.759.818.430,00
2.10 . 2.10.01.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	4.070.388.430,00	8.337.895.000,00	12.408.283.430,00
2.10 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	4.070.388.430,00	8.337.895.000,00	12.408.283.430,00
2.10 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	843.810.000,00	843.810.000,00
2.10 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	843.810.000,00	843.810.000,00
2.10 . 4.01.04.01	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	257.725.000,00	257.725.000,00
2.10 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	257.725.000,00	257.725.000,00
2.10 . 4.04.02.01	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.045.055.264,00	5.954.620.000,00	10.999.675.264,00
2.11 . 2.11.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.045.055.264,00	5.700.000.000,00	10.745.055.264,00
2.11 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	5.045.055.264,00	5.700.000.000,00	10.745.055.264,00
2.11 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	254.620.000,00	254.620.000,00
2.12	Penanaman Modal	0,00	0,00	254.620.000,00	254.620.000,00
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.819.306.000,00	10.655.730.145,00	5.225.000.000,00	15.880.730.145,00
2.12 . 2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu	75.819.306.000,00	10.655.730.145,00	5.225.000.000,00	15.880.730.145,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	75.819.306.000,00	10.655.730.145,00	5.225.000.000,00	15.880.730.145,00
2.13 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	5.012.820.000,00	5.012.820.000,00
2.13 . 1.01.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.13 . 4.01.27	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.13 . 4.01.27.01	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	12.820.000,00	12.820.000,00
2.14	Statistik	0,00	0,00	12.820.000,00	12.820.000,00
2.14 . 3.03.01	Dinas Pertanian	0,00	0,00	670.000.000,00	670.000.000,00
2.14 . 3.03.01.01	Dinas Pertanian	0,00	0,00	670.000.000,00	670.000.000,00
2.16	Kebudayaan	0,00	0,00	670.000.000,00	670.000.000,00
		0,00	5.437.242.967,00	18.946.893.500,00	24.384.136.467,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
2.16 . 2.16.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan				
2.16 . 2.16.01.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	5.437.242.967,00	18.423.346.000,00	23.860.588.967,00
2.16 . 4.01.05	Kecamatan Karawang Barat	0,00	5.437.242.967,00	18.423.346.000,00	23.860.588.967,00
2.16 . 4.01.05.01	Kecamatan Karawang Barat	0,00	0,00	40.750.000,00	40.750.000,00
2.16 . 4.01.06	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	40.750.000,00	40.750.000,00
2.16 . 4.01.06.01	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16 . 4.01.07	Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16 . 4.01.07.01	Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16 . 4.01.08	Kecamatan Ciampel	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16 . 4.01.08.01	Kecamatan Ciampel	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16 . 4.01.09	Kecamatan Klari	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16 . 4.01.09.01	Kecamatan Klari	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16 . 4.01.10	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16 . 4.01.10.01	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.16 . 4.01.11	Kecamatan Kutawaluya	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2.16 . 4.01.11.01	Kecamatan Kutawaluya	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.16 . 4.01.12	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.16 . 4.01.12.01	Kecamatan Batujaya	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.13	Kecamatan Tirtajaya	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.13.01	Kecamatan Tirtajaya	0,00	0,00	10.687.500,00	10.687.500,00
2.16 . 4.01.14	Kecamatan Pedes	0,00	0,00	10.687.500,00	10.687.500,00
2.16 . 4.01.14.01	Kecamatan Pedes	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.15	Kecamatan Cibuaya	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.15.01	Kecamatan Cibuaya	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.16 . 4.01.17	Kecamatan Cikampek	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.16 . 4.01.17.01	Kecamatan Cikampek	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
2.16 . 4.01.18	Kecamatan Jatisari	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
2.16 . 4.01.18.01	Kecamatan Jatisari	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16 . 4.01.19	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.16 . 4.01.19.01	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.20	Kecamatan Tirtamulya	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		0,00	0,00	33.400.000,00	33.400.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
2.16 . 4.01.20.01	Kecamatan Tirtamulya	0,00	0,00	33.400.000,00	33.400.000,00
2.16 . 4.01.21	Kecamatan Telagasari	0,00	0,00	7.225.000,00	7.225.000,00
2.16 . 4.01.21.01	Kecamatan Telagasari	0,00	0,00	7.225.000,00	7.225.000,00
2.16 . 4.01.22	Kecamatan Rawamerta	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.22.01	Kecamatan Rawamerta	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.23	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.16 . 4.01.23.01	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.16 . 4.01.24	Kecamatan Tempuran	0,00	0,00	7.225.000,00	7.225.000,00
2.16 . 4.01.24.01	Kecamatan Tempuran	0,00	0,00	7.225.000,00	7.225.000,00
2.16 . 4.01.25	Kecamatan Majalaya	0,00	0,00	21.760.000,00	21.760.000,00
2.16 . 4.01.25.01	Kecamatan Majalaya	0,00	0,00	21.760.000,00	21.760.000,00
2.16 . 4.01.26	Kecamatan Jayakarta	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.16 . 4.01.26.01	Kecamatan Jayakarta	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2.16 . 4.01.27	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.27.01	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.28	Kecamatan Banyusari	0,00	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00
2.16 . 4.01.28.01	Kecamatan Banyusari	0,00	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00
2.16 . 4.01.29	Kecamatan Kota Baru	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
2.16 . 4.01.29.01	Kecamatan Kota Baru	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00
2.16 . 4.01.30	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16 . 4.01.30.01	Kecamatan Karawang Timur	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2.16 . 4.01.31	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.31.01	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.32	Kecamatan Tegalwaru	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
2.16 . 4.01.32.01	Kecamatan Tegalwaru	0,00	0,00	9.400.000,00	9.400.000,00
2.16 . 4.01.33	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00
2.16 . 4.01.33.01	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	10.650.000,00	10.650.000,00
2.16 . 4.01.34	Kecamatan Cilebar	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.16 . 4.01.34.01	Kecamatan Cilebar	0,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.17	Perpustakaan	0,00	3.321.259.206,00	2.503.250.000,00	5.824.509.206,00
2.17 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.321.259.206,00	2.503.250.000,00	5.824.509.206,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
2.17 . 2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	3.321.259.206,00	2.503.250.000,00	5.824.509.206,00
2.18	Kearsipan	0,00	0,00	938.722.000,00	938.722.000,00
2.18 . 2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	695.020.000,00	695.020.000,00
2.18 . 2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	695.020.000,00	695.020.000,00
2.18 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	208.452.000,00	208.452.000,00
2.18 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	208.452.000,00	208.452.000,00
2.18 . 4.01.06	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.18 . 4.01.06.01	Kecamatan Pangkalan	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.18 . 4.02.01	Inspektorat	0,00	0,00	30.250.000,00	30.250.000,00
2.18 . 4.02.01.01	Inspektorat	0,00	0,00	30.250.000,00	30.250.000,00
3	Urusan Pilihan	6.486.720.000,00	50.421.789.010,00	67.125.942.450,00	117.547.731.460,00
3.01	Kelautan dan Perikanan	594.000.000,00	8.265.675.972,00	6.920.342.450,00	15.186.018.422,00
3.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	594.000.000,00	8.265.675.972,00	6.920.342.450,00	15.186.018.422,00
3.01 . 3.01.01.01	Dinas Perikanan	594.000.000,00	8.265.675.972,00	6.920.342.450,00	15.186.018.422,00
3.02	Pariwisata	0,00	0,00	1.485.000.000,00	1.485.000.000,00
3.02 . 2.16.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	1.485.000.000,00	1.485.000.000,00
3.02 . 2.16.01.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	1.485.000.000,00	1.485.000.000,00
3.03	Pertanian	378.600.000,00	31.466.754.635,00	40.868.850.000,00	72.335.604.635,00
3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian	378.600.000,00	31.466.754.635,00	40.868.850.000,00	72.335.604.635,00
3.03 . 3.03.01.01	Dinas Pertanian	378.600.000,00	31.466.754.635,00	40.868.850.000,00	72.335.604.635,00
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	0,00	6.462.710.000,00	6.462.710.000,00
3.05 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	6.462.710.000,00	6.462.710.000,00
3.05 . 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	6.462.710.000,00	6.462.710.000,00
3.06	Perdagangan	0,00	0,00	3.649.000.000,00	3.649.000.000,00
3.06 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	3.574.000.000,00	3.574.000.000,00
3.06 . 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	3.574.000.000,00	3.574.000.000,00
3.06 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.06 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
3.07	Perindustrian	5.514.120.000,00	10.689.358.403,00	7.088.290.000,00	17.777.648.403,00
3.07 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.514.120.000,00	10.689.358.403,00	7.088.290.000,00	17.777.648.403,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
3.07 . 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.514.120.000,00	10.689.358.403,00	7.088.290.000,00	17.777.648.403,00
3.08	Transmigrasi	0,00	0,00	651.750.000,00	651.750.000,00
3.08 . 2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	651.750.000,00	651.750.000,00
3.08 . 2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	651.750.000,00	651.750.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	3.604.581.327.392,00	802.801.673.842,00	203.178.813.250,00	1.005.980.487.092,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	2.770.070.427.392,00	746.149.965.280,00	110.677.538.150,00	856.827.503.430,00
4.01 . 1.04.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4.01 . 1.04.01.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	0,00	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
4.01 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	1.085.325.000,00	1.085.325.000,00
4.01 . 2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	1.085.325.000,00	1.085.325.000,00
4.01 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	19.125.000,00	19.125.000,00
4.01 . 2.08.01.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	19.125.000,00	19.125.000,00
4.01 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	264.895.000,00	264.895.000,00
4.01 . 2.10.01.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	264.895.000,00	264.895.000,00
4.01 . 4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	20.068.172.100,00	0,00	20.068.172.100,00
4.01 . 4.01.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	20.068.172.100,00	0,00	20.068.172.100,00
4.01 . 4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	1.373.568.800,00	0,00	1.373.568.800,00
4.01 . 4.01.02.01	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	1.373.568.800,00	0,00	1.373.568.800,00
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	24.169.218.919,00	53.013.029.000,00	77.182.247.919,00
4.01 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	24.169.218.919,00	53.013.029.000,00	77.182.247.919,00
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	0,00	6.106.762.078,00	42.052.250.000,00	48.159.012.078,00
4.01 . 4.01.04.01	Sekretariat DPRD	0,00	6.106.762.078,00	42.052.250.000,00	48.159.012.078,00
4.01 . 4.01.05	Kecamatan Karawang Barat	0,00	10.092.717.206,00	1.598.580.000,00	11.691.297.206,00
4.01 . 4.01.05.01	Kecamatan Karawang Barat	0,00	10.092.717.206,00	1.598.580.000,00	11.691.297.206,00
4.01 . 4.01.06	Kecamatan Pangkalan	0,00	2.223.552.590,00	303.000.000,00	2.526.552.590,00
4.01 . 4.01.06.01	Kecamatan Pangkalan	0,00	2.223.552.590,00	303.000.000,00	2.526.552.590,00
4.01 . 4.01.07	Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	2.513.485.685,00	333.390.000,00	2.846.875.685,00
4.01 . 4.01.07.01	Kecamatan Telukjambe Timur	0,00	2.513.485.685,00	333.390.000,00	2.846.875.685,00
4.01 . 4.01.08	Kecamatan Ciampel	0,00	2.122.162.505,00	287.000.000,00	2.409.162.505,00
4.01 . 4.01.08.01	Kecamatan Ciampel	0,00	2.122.162.505,00	287.000.000,00	2.409.162.505,00
4.01 . 4.01.09	Kecamatan Klari	0,00	3.011.859.748,00	319.844.000,00	3.331.703.748,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
1	2	3	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
			4	5	6
4.01 . 4.01.09.01	Kecamatan Klari				
4.01 . 4.01.10	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	3.011.859.748,00	319.844.000,00	3.331.703.748,00
4.01 . 4.01.10.01	Kecamatan Rengasdengklok	0,00	2.881.420.979,00	295.469.000,00	3.176.889.979,00
4.01 . 4.01.11	Kecamatan Kutawaluya	0,00	2.881.420.979,00	295.469.000,00	3.176.889.979,00
4.01 . 4.01.11.01	Kecamatan Kutawaluya	0,00	2.306.856.426,00	293.457.450,00	2.600.313.876,00
4.01 . 4.01.12	Kecamatan Batujaya	0,00	2.306.856.426,00	293.457.450,00	2.600.313.876,00
4.01 . 4.01.12.01	Kecamatan Batujaya	0,00	2.382.821.826,00	282.945.000,00	2.665.766.826,00
4.01 . 4.01.13	Kecamatan Tirtajaya	0,00	2.382.821.826,00	282.945.000,00	2.665.766.826,00
4.01 . 4.01.13.01	Kecamatan Tirtajaya	0,00	2.224.485.976,00	320.200.000,00	2.544.685.976,00
4.01 . 4.01.14	Kecamatan Pedes	0,00	2.224.485.976,00	320.200.000,00	2.544.685.976,00
4.01 . 4.01.14.01	Kecamatan Pedes	0,00	2.256.136.289,00	316.480.000,00	2.572.616.289,00
4.01 . 4.01.15	Kecamatan Cibuaya	0,00	2.256.136.289,00	316.480.000,00	2.572.616.289,00
4.01 . 4.01.15.01	Kecamatan Cibuaya	0,00	2.526.705.671,00	282.773.600,00	2.809.479.271,00
4.01 . 4.01.16	Kecamatan Pakisjaya	0,00	2.526.705.671,00	282.773.600,00	2.809.479.271,00
4.01 . 4.01.16.01	Kecamatan Pakisjaya	0,00	2.394.927.453,00	267.255.000,00	2.662.182.453,00
4.01 . 4.01.17	Kecamatan Cikampek	0,00	2.394.927.453,00	267.255.000,00	2.662.182.453,00
4.01 . 4.01.17.01	Kecamatan Cikampek	0,00	2.918.317.062,00	299.749.000,00	3.218.066.062,00
4.01 . 4.01.18	Kecamatan Jatisari	0,00	2.918.317.062,00	299.749.000,00	3.218.066.062,00
4.01 . 4.01.18.01	Kecamatan Jatisari	0,00	3.083.664.464,00	290.900.000,00	3.374.564.464,00
4.01 . 4.01.19	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,00	3.083.664.464,00	290.900.000,00	3.374.564.464,00
4.01 . 4.01.19.01	Kecamatan Cilamaya Wetan	0,00	2.552.229.680,00	308.950.000,00	2.861.179.680,00
4.01 . 4.01.20	Kecamatan Tirtamulya	0,00	2.552.229.680,00	308.950.000,00	2.861.179.680,00
4.01 . 4.01.20.01	Kecamatan Tirtamulya	0,00	2.235.392.531,00	257.440.000,00	2.492.832.531,00
4.01 . 4.01.21	Kecamatan Telagasari	0,00	2.235.392.531,00	257.440.000,00	2.492.832.531,00
4.01 . 4.01.21.01	Kecamatan Telagasari	0,00	2.590.888.002,00	265.280.000,00	2.856.168.002,00
4.01 . 4.01.22	Kecamatan Rawamerta	0,00	2.590.888.002,00	265.280.000,00	2.856.168.002,00
4.01 . 4.01.22.01	Kecamatan Rawamerta	0,00	2.246.996.895,00	353.400.000,00	2.600.396.895,00
4.01 . 4.01.23	Kecamatan Lemahabang	0,00	2.246.996.895,00	353.400.000,00	2.600.396.895,00
4.01 . 4.01.23.01	Kecamatan Lemahabang	0,00	2.365.643.984,00	303.100.000,00	2.668.743.984,00
4.01 . 4.01.24	Kecamatan Tempuran	0,00	2.365.643.984,00	303.100.000,00	2.668.743.984,00
4.01 . 4.01.24.01	Kecamatan Tempuran	0,00	2.848.760.074,00	289.641.500,00	3.138.401.574,00
		0,00	2.848.760.074,00	289.641.500,00	3.138.401.574,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4.01.25	Kecamatan Majalaya	0,00	2.487.737.183,00	285.525.000,00	2.773.262.183,00
4.01 . 4.01.25.01	Kecamatan Majalaya	0,00	2.487.737.183,00	285.525.000,00	2.773.262.183,00
4.01 . 4.01.26	Kecamatan Jayakarta	0,00	2.264.107.614,00	293.950.000,00	2.558.057.614,00
4.01 . 4.01.26.01	Kecamatan Jayakarta	0,00	2.264.107.614,00	293.950.000,00	2.558.057.614,00
4.01 . 4.01.27	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	2.236.716.976,00	299.682.000,00	2.536.398.976,00
4.01 . 4.01.27.01	Kecamatan Cilamaya Kulon	0,00	2.236.716.976,00	299.682.000,00	2.536.398.976,00
4.01 . 4.01.28	Kecamatan Banyusari	0,00	2.287.957.100,00	295.200.000,00	2.583.157.100,00
4.01 . 4.01.28.01	Kecamatan Banyusari	0,00	2.287.957.100,00	295.200.000,00	2.583.157.100,00
4.01 . 4.01.29	Kecamatan Kota Baru	0,00	2.293.152.617,00	284.545.200,00	2.577.697.817,00
4.01 . 4.01.29.01	Kecamatan Kota Baru	0,00	2.293.152.617,00	284.545.200,00	2.577.697.817,00
4.01 . 4.01.30	Kecamatan Karawang Timur	0,00	6.150.119.790,00	1.075.254.000,00	7.225.373.790,00
4.01 . 4.01.30.01	Kecamatan Karawang Timur	0,00	6.150.119.790,00	1.075.254.000,00	7.225.373.790,00
4.01 . 4.01.31	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	2.438.067.215,00	339.340.000,00	2.777.407.215,00
4.01 . 4.01.31.01	Kecamatan Telukjambe Barat	0,00	2.438.067.215,00	339.340.000,00	2.777.407.215,00
4.01 . 4.01.32	Kecamatan Tegalwaru	0,00	2.294.292.384,00	310.240.000,00	2.604.532.384,00
4.01 . 4.01.32.01	Kecamatan Tegalwaru	0,00	2.294.292.384,00	310.240.000,00	2.604.532.384,00
4.01 . 4.01.33	Kecamatan Purwasari	0,00	1.990.402.791,00	295.123.400,00	2.285.526.191,00
4.01 . 4.01.33.01	Kecamatan Purwasari	0,00	1.990.402.791,00	295.123.400,00	2.285.526.191,00
4.01 . 4.01.34	Kecamatan Cilebar	0,00	2.066.385.979,00	319.790.000,00	2.386.175.979,00
4.01 . 4.01.34.01	Kecamatan Cilebar	0,00	2.066.385.979,00	319.790.000,00	2.386.175.979,00
4.01 . 4.02.01	Inspektorat	0,00	9.751.629.385,00	0,00	9.751.629.385,00
4.01 . 4.02.01.01	Inspektorat	0,00	9.751.629.385,00	0,00	9.751.629.385,00
4.01 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.770.070.427.392,00	591.596.620.307,00	175.410.000,00	591.772.030.307,00
4.01 . 4.04.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	883.419.600,00	33.878.299.389,00	175.410.000,00	34.053.709.389,00
4.01 . 4.04.01.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	2.769.187.007.792,00	557.718.320.918,00	0,00	557.718.320.918,00
4.01 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	8.796.028.996,00	0,00	8.796.028.996,00
4.01 . 4.05.01.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	8.796.028.996,00	0,00	8.796.028.996,00
4.02	Pengawasan	0,00	0,00	7.664.750.000,00	7.664.750.000,00
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	0,00	0,00	7.664.750.000,00	7.664.750.000,00
4.02 . 4.02.01.01	Inspektorat	0,00	0,00	7.664.750.000,00	7.664.750.000,00
4.03	Perencanaan	0,00	7.108.062.996,00	9.395.431.550,00	16.503.494.546,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
4.03 . 4.01.11	Kecamatan Kutawaluya	0,00	0,00	5.000.050,00	5.000.050,00
4.03 . 4.01.11.01	Kecamatan Kutawaluya	0,00	0,00	5.000.050,00	5.000.050,00
4.03 . 4.01.23	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00
4.03 . 4.01.23.01	Kecamatan Lemahabang	0,00	0,00	10.900.000,00	10.900.000,00
4.03 . 4.01.33	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	2.341.500,00	2.341.500,00
4.03 . 4.01.33.01	Kecamatan Purwasari	0,00	0,00	2.341.500,00	2.341.500,00
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	7.108.062.996,00	9.377.190.000,00	16.485.252.996,00
4.03 . 4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	7.108.062.996,00	9.377.190.000,00	16.485.252.996,00
4.04	Keuangan	834.510.900.000,00	49.543.645.566,00	65.296.093.550,00	114.839.739.116,00
4.04 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	422.210.000,00	422.210.000,00
4.04 . 2.10.01.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	422.210.000,00	422.210.000,00
4.04 . 2.16.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00
4.04 . 2.16.01.01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	246.000.000,00	246.000.000,00
4.04 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
4.04 . 3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00
4.04 . 4.01.03	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	1.897.800.000,00	1.897.800.000,00
4.04 . 4.01.03.01	Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang	0,00	0,00	1.897.800.000,00	1.897.800.000,00
4.04 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	122.810.000,00	122.810.000,00
4.04 . 4.03.01.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	122.810.000,00	122.810.000,00
4.04 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	13.362.090.000,00	13.362.090.000,00
4.04 . 4.04.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	0,00	0,00	13.362.090.000,00	13.362.090.000,00
4.04 . 4.04.02	Badan Pendapatan Daerah	834.510.900.000,00	49.543.645.566,00	49.170.183.550,00	98.713.829.116,00
4.04 . 4.04.02.01	Badan Pendapatan Daerah	834.510.900.000,00	49.543.645.566,00	49.170.183.550,00	98.713.829.116,00
4.05	Kepegawaian	0,00	0,00	10.145.000.000,00	10.145.000.000,00
4.05 . 4.05.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	10.145.000.000,00	10.145.000.000,00
4.05 . 4.05.01.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	10.145.000.000,00	10.145.000.000,00
JUMLAH		3.988.794.323.392,00	2.000.519.407.948,00	2.291.846.271.907,00	4.292.365.679.855,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(303.571.356.463,00)			
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI					
Printed By SimDd					
Halaman 17					

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PEMBIAYAAN			SILPA TAB
		PENERIMAAN	PENGELUARAN	PEMBIAYAAN NETTO	
1	2	3	4	5	6
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang				
4.01	Administrasi Pemerintahan	314.571.356.463,00	11.000.000.000,00	303.571.356.463,00	
4.01 . 4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	314.571.356.463,00	11.000.000.000,00	303.571.356.463,00	
4.01 . 4.04.01.02	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	314.571.356.463,00	11.000.000.000,00	303.571.356.463,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN					0,00

